

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, tetap menghadapi permasalahan kemiskinan yang kompleks. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidup serta meningkatkan kondisi perekonomian mereka (Khusnul Fikri dkk, 2019).

Kemiskinan juga salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah lain yang secara jelas berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai individu yang mempunyai rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Badan Pusat Statistik Garis kemiskinan makanan adalah garis yang mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum makanannya sebanyak 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum non makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (Utara, 2023).

Nurkse (dalam Kuncoro, 2006) menggambarkan dalam teori lingkaran kemiskinan bahwa keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas manusia akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan yang diterima akan berakibat pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi. Investasi bisa berupa investasi sumber daya manusia yaitu dengan ukuran pendidikan, maupun investasi kapital dengan ukuran konsumsi. Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan tersebut dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan besarnya konsumsi.

Kemiskinan adalah dampak dari tingginya jumlah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan, yang salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan (Seran, 2017). Dariwardani (2014), menjelaskan bahwa pendidikan memiliki kaitan erat dengan masalah kemiskinan, Secara umum

semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin menurun tingkat kemiskinan. Namun, tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi menjadi tantangan serius bagi negara (Lim, 2011). Pengangguran yang dialami oleh lulusan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi persoalan ini (Meidani, 2011). Hal ini terjadi karena sistem pendidikan yang ada dianggap belum selaras dengan keterampilan dan pendidikan yang diperlukan dalam dunia kerja (Mahmood & kolega. 2014).

Selain pendidikan, tingkat pengangguran juga menjadi indikator penting dalam memahami permasalahan kemiskinan. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran (Efrianti *et al.*, 2021). Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja (Sukirno, 1994). Pengangguran merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi biasanya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan

kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan. Di Provinsi Sumatera Selatan, fluktuasi dalam tingkat pengangguran telah menjadi perhatian utama, terutama dengan adanya perubahan dalam struktur ekonomi dan industri di daerah tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Sebagai negara berkembang, keberadaan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah hal yang mengejutkan. Bahkan, negara-negara maju sekalipun masih memiliki penduduk miskin di wilayahnya. Namun, kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi permasalahan tersebut. Meskipun kebijakan yang dirancang terlihat ideal, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai hambatan (Pokhrel, 2024). Pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif dalam menangani masalah kemiskinan melalui kebijakan dan program yang inovatif, berorientasi pada karakteristik serta kondisi faktual masyarakat di daerah, dan yang mampu menciptakan sinergi antara satuan kerja untuk memperkuat ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional menjadi salah satu faktor yang menghambat terciptanya kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan. Sistem distribusi yang tidak berpihak pada pengentasan kemiskinan hanya akan memperkaya kelompok tertentu saja, sehingga permasalahan ini menjadi isu penting yang harus segera ditangani untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi hingga saat ini.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi strategis di Pulau Sumatera dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Dengan letak geografis yang menguntungkan, provinsi ini berperan penting dalam menunjang perekonomian kawasan Sumatera. Namun demikian, secara ekonomi, Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kemiskinan. Meskipun memiliki kekayaan alam seperti tambang, perkebunan, dan perikanan, provinsi ini belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mencapai 1.081,59 jiwa. Angka ini terus mengalami penurunan hingga 984,24 jiwa pada tahun 2024. Meski demikian, tingkat kemiskinan di provinsi ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selama lima tahun terakhir, Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup menonjol di Pulau Sumatera.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi alam yang besar seharusnya menjadi modal utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Irham *et al.*, 2024). Sayangnya, tantangan dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang belum maksimal menjadi hambatan dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan

inovatif yang berbasis pada kebutuhan lokal untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Berikut ini adalah gambaran jumlah penduduk miskin berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh provinsi ini dalam mengatasi kemiskinan.

Tabel 1.1
Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024

No	Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
1	2020	8,24	5,51	1.081,59
2	2021	8,30	4,98	1.113,76
3	2022	8,37	4,63	1.044,69
4	2023	8,50	4,11	1.045,68
5	2024	8,57	3,86	984,24

Sumber: (BPS Sumatera Selatan, 2025)

Berdasarkan data yang dijabarkan pada Tabel 1, rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 8,24 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,57 tahun pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 1.081,59 ribu jiwa, pada tahun 2021 menjadi 1.113,76 ribu jiwa. Fakta ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan pendidikan seharusnya berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan. Penelitian oleh Novrizal (2023) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan karena masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan stabil. Oleh karena itu, peningkatan kemiskinan pada tahun 2021 meskipun pendidikan

meningkat, mengindikasikan adanya variabel lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di tahun tersebut, seperti dampak pandemi, inflasi, atau sektor informal yang belum stabil.

Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki peluang untuk mengembangkan sektor informal sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran. Banyak masyarakat yang tergolong dalam pengangguran terbuka sebenarnya sedang dalam proses mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha tetapi belum mulai bekerja (Mulia & Saputra, 2020). Oleh karena itu, sektor informal dapat menjadi wadah bagi mereka untuk berkontribusi pada perekonomian dan meningkatkan taraf hidup.

Berdasarkan data yang dijabarkan pada Tabel 1, Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 5,51% pada tahun 2020 menjadi 3,86% pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 1.081,59 ribu jiwa, pada tahun 2021 menjadi 1.113,76 ribu jiwa. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penurunan tingkat pengangguran seharusnya diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin, karena semakin banyak penduduk yang bekerja seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian Dea (2021) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan, di mana semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin rendah pula angka kemiskinan. Hal ini juga diperkuat oleh teori dari Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya

mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Oleh karena itu, kondisi di tahun 2021 mengindikasikan kemungkinan adanya faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti rendahnya kualitas pekerjaan, pendapatan tidak layak, atau dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih.

Ketidaksesuaian antara teori dengan fakta di lapangan menjadi suatu fenomena menarik bagi peneliti sehingga tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera selatan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh tingkat pendidikan (X1) dan pengangguran terbuka (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 baik secara parsial maupun simultan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan (X1), dan pengangguran terbuka (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 baik secara parsial maupun simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman penulis tentang pengaruh tingkat pendidikan dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang tingkat pendidikan dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.